



## KINERJA PEMPROV DKI

## DPRD Beri Gubernur Nilai Merah

JAKARTA, KOMPAS — DPRD DKI Jakarta memberikan nilai merah terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta untuk tahun 2014. Dewan mengeluarkan lima rekomendasi agar gubernur dan jajarannya memperbaiki kinerja.

Dalam Rapat Paripurna, Kamis (23/4), DPRD melaporkan hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban yang telah disampaikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 5 April. "DPRD menilai kinerja Gubernur dan aparatnya pada tahun 2014 sangat buruk," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan yang membacakan laporan.

Menurut Pantas, buruknya kinerja itu bisa dilihat dari pendapatan daerah yang hanya 66,8 persen atau Rp 43,4 triliun dari rencana Rp 65,04 triliun; belanja daerah hanya terealisasi 59,32 persen yang merupakan belanja

terendah; dan realisasi penyer-taan modal pemerintah hanya terealisasi 43,62 persen.

Selain itu, kenaikan nilai jual obyek pajak yang semena-mena dianggap menyengsarakan masyarakat. Angka kemiskinan yang meningkat dari 370.000 orang (2013) menjadi 412.000 orang (2014) adalah indikasi Gubernur gagal menyejahterakan warga.

"Gubernur juga melanggar undang-undang karena memberikan izin reklamasi dan menghapus jabatan wakil lurah. Gubernur juga belum mampu mempertahankan aset Pemprov DKI yang beperkara di pengadilan," ujar Pantas.

Dewan menilai, penerimaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) belum transparan sehingga harus diaudit.

Dewan merekomendasikan lima hal kepada Gubernur, yaitu mematuhi perundang-undangan,

tidak lepas tanggung jawab karena baru menjabat dua bulan, tidak banyak berwacana, menyiapkan ahli hukum yang kuat, dan bersinergi dengan banyak pihak untuk memajukan Jakarta.

Basuki, yang baru dilantik sebagai gubernur pada 15 November 2014 menggantikan Joko Widodo yang dilantik sebagai presiden, mengatakan, penilaian itu adalah hak Dewan dan dirinya tidak berhak membela diri.

## Kota Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dalam pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) di Gedung DPRD setempat, mengatakan, pihaknya belum dapat memenuhi target pendapatan daerah dalam APBD 2014. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum optimal sehingga target pendapatan tidak tercapai. (FRO/PIN)